

BAB IV

DAMPAK KEBIJAKAN INVASI AMERIKA SERIKAT DI IRAK

Pada bab empat ini penulis akan membahas tentang akhir dari pengaruh kebijakan Amerika Serikat di Irak pasca terjadinya invasi Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003, pengaruh Amerika Serikat semakin dominan di Irak baik secara politik maupun ekonomi disini penulis hanya menulis satu sub-bab yang akan menjawab dari rumusan masalah yakni, pengaruh Amerika Serikat di Irak Pasca invasi Amerika Serikat, lalu ada di ikuti dengan adanya perubahan politik di Irak pasca invasi yang mendorong Irak merubah sistem politiknya menuju demokrasi, semua ini terjadi pasca turunnya kepemimpinan Saddam Hussein.

4.1 Dampak invasi Amerika Serikat terhadap Irak dengan Perubahan Tatahan Politik di Irak Menuju Sistem Demokrasi

Setelah turunnya Saddam Husein pada 2003 Amerika Serikat langsung mempercepat gerakanya untuk membenahi Irak dengan memulai dari membangun terlebih dahulu Irak. Menurut laporan yang *publish* pada *cbsnews*, dana kurang lebih dari \$60 miliar sudah diberikan untuk membangun kembali Irak yang sudah porak-peranda akibat perang. Sebanyak \$2,4 miliar dicairkan untuk perbaikan di bidang pengairan, kelistrikan, juga termasuk sektor lainnya antara lain makanan, kesehatan dan tanggungan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal pascaperang. Dampaknya memang cukup besar, di atas kertas ekonomi Irak pada 2004 masih tercatat \$36,628 miliar, nilai yang tak jauh berbeda ketika kali pertama Saddam Husein berkuasa. Kemudian ekonomi Irak

membalik, pada 2008 dengan GDP mencapai \$131,614 miliar, hingga melaju pada puncaknya di 2014 yang mencapai \$234,648 miliar, dengan GDP per kapita tertinggi pasca-Saddam sebesar \$6.879,698 per kapita pertahun, namun, capaian tertinggi GDP per kapita yang ditorehkan pada masa puncak ekonomi Saddam Husein pada tahun 1990 belum bisa tertandingi. Catatan makro ekonomi ini jelas di bawah dari capaian pasca-Saddam Husein berkuasa, yang rata-rata ekonomi tumbuh 9,94 persen dan tingkat inflasi hanya 9,30 persen.

Namun, meski GDP per kapita kini tak bisa mengalahkan Irak rezim Saddam, kinerja ekonomi rata-rata sepeninggal Saddam relatif stabil, tidak sefluktuatif saat Saddam masih memimpin (Nathaniel, 2017).

Pada saat ekonomi Irak Pasca Invasi Amerika Serikat rata-rata para peneliti lebih fokus tentang masalah minyak, karena Irak merupakan negara yang terkandung banyak ladang minyak di negaranya, sehingga dengan ini Irak mendapat peringkat kedua produsen minyak setelah Arab Saudi. Minyak menjadi fokus dunia dan tidak terkecuali Amerika Serikat dan Israel yang ingin menguasai ladang minyak tersebut. Minyak di Irak adalah sebuah ulasan yang penting dibalik invasi Amerika Serikat. Sampai akhir Maret 2003, tercatat cadangan minyak yang masih ada sekitar 112,6 miliar barel atau sebanding dengan 11% cadangan terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi yang di atas 200 miliar barrel. Minyak menjadi pendapatan utama bagi pemerintahan Irak yakni sekitar 95%, sisanya 5% hanya dari umum dan wisata. Setiap tahun Irak memperoleh pendapatannya berkisar 22 miliar dollar Amerika Serikat yang berasal dari minyak yang sebagian besar di ekspor ke Amerika (Dipoyudo, 1982).

Namun disini disimpulkan bahwa pengaruh Amerika Serikat semakin dominan dimana sentral ekonomi Irak yakni minyak yang nantinya dimasa depan akan menjadi sejarah tersendiri bagi Irak, dimana nantinya akan ada pemusatan

konsentrasi pengiriman minyak secara besar-besaran setiap tahunnya yang ditujukan kepada Amerika Serikat, karena alasan utama sebenarnya dibalik invasi Amerika Serikat adalah ingin menambahkan cadangan minyak dengan cara mengimpor dari luar negeri yakni Irak. Dalam hal ini ditakutkan akan menimbulkan kesenjangan ekonomi bagi Amerika Serikat dimana minyak bukan hanya kebutuhan negara Amerika Serikat saja tapi juga kebutuhan utama bagi setiap negara. Maka dari itu Amerika Serikat pasca invasi telah mengandalkan cadangan minyak yang ada di Irak dengan pengaruh politiknya yang sangat kuat pasca invasi terhadap Irak (Erawan, 2007)

Lalu setelah membangun Irak, Amerika Serikat akan fokus pada pemilihan umum untuk sementara yakni mengajukan pemimpin transisi di Irak Setelah Saddam Hussein yang ditaktor turun dari jabatannya, namun bukannya Irak menjadi damai tapi Irak menjadi negara yang penuh dengan kekerasan dan lebih miris kekerasan itu adalah perang saudara antara kelompok Sunni, Syi'ah dan Kurdi serangan ini yang mengakibatkan seluruh kota menjadi lumpuh hingga reporter Irak mengalami kesulitan untuk mengakses berita karena serangan militer yang juga dilakukan Amerika Serikat secara bertubi-tubi. Ternyata perubahan sosial yang muncul diakibatkan dampak dari Invasi Amerika Serikat terhadap Irak ini sangat parah salah satunya adalah ketakutan akan meletusnya perang saudara diantara masyarakat Irak sendiri, yang mana perang terjadi antara pendukung setia dari Saddam Husein dengan kelompok yang kontra terhadap beliau, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Irak terbagi atas dua kelompok besar terlihat dari sikap yang mereka tunjukkan terhadap Saddam Hussein, yakni kelompok utama dari pendukung hingga pengikut partai Baath sebuah partai terbesar yang digunakan sebagai wadah politik semasa pemerintahan Saddam Hussein, kemudian kelompok kedua ini adalah orang-orang yang kontra terhadap Saddam Hussein dan umumnya

orang-orang ini bermazhab Syi'ah di Irak, karena mereka menilai bahwa pemerintahan Saddam Hussein ini sangat ditaktor dan bertindak semaunya akan orang-orang yang mengikuti mazhab Syi'ah (Almudarris, 2004, p. 121).

Kelompok kurdi yang juga kontra terhadap pemerintahan Saddam Hussein ini dikarenakan alasan yang kuat dimana memang dari segi pemerataan pembangunan yang berada di Kurdi sangat tidak seimbang dengan pembangunan-pembangunan yang ada di kawasan lain di Irak. Hal ini terlihat jelas dari keterlibatan yang tunjukkan langsung oleh para orang-orang Kurdi dalam membela Amerika Serikat dengan tujuan untuk menggulingkan Saddam Hussein karena mereka berharap bahwa ketika Saddam Hussein jatuh ada harapan untuk masyarakat Kurdi dalam mendapatkan kursi di pemerintahan, Saddam Hussein memerangi orang-orang Kurdi ini tidak lain karena mereka di tuduh pada saat perak Irak-Iran orang-orang Kurdi ini mendukung Iran maka dari itulah Irak mulai melakukan perlakuan tidak adil terhadap orang-orang Kurdi ini (Sukarwo, 2009, p. 141).

Awal pertama permusuhan mereka antar kelompok yang pro dan kontra kepada Saddam Hussein tambah memanas setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein dari tanah Irak. Permasalahan yang telah di jelaskan sebelumnya akan menimbulkan konflik internal yang akan melibatkan masyarakat di Irak sendiri. Seperti yang pertama ialah perang saudara antara Sunni dan Syi'ah sudah terbukti dengan adanya pembunuhan putra bungsu Ayatullah al-Khui orang ini adalah seorang tokoh paling penting di mata para pengikut Syi'ah Irak, anak bungunya juga seorang pemimpin spiritual kaum Syi'ah Irak bernama Abdul Majid al-Khui di takutkan hal ini akan terus berlanjut sampai ada kebijakan politik dan soial yang akan meredam permusuhan antara keduanya diharapkan pihak yang akan mendamaikan keduanya ini adalah datang dari pihak pemerintahan sendiri. Aktivitas yang dilakukan oleh para pejuang kurdi dalam invasi Amerika Serikat menambahkan

kekisruhan dan akan menambahkan satu peta politik yang akan terlihat di Irak, persaingan orang Kurdi yang akan mengincar kursi pemerintahan dengan cara memberontak dengan orang pngikut Syi'ah yang akan memberontak juga yang merasa mereka berhak atas ursi pemerintah di Irak karena sebagai kaum mayoritas di Irak (Kuncahyo, 2005).

Pasca pemerintahan Saddam Hussein jatuh bekas-bekas kejayaan Bani Abbasiyah di Irak tidak tampak lagi, segalanya terlihat suram, suara senjata dan bekas puing-puing bangunan telah berubah menjadi negeri yang dipenuhi oleh bom. Semakin hari semakin kompleks persoalan yang terjadi di Irak berbagai permasalahan telah melanda bangsa itu, kontak senjata antara kedua negara Amerika dan masyarakat pun telah mewarnai hari-hari mereka perseteruan antara mahzab ini memberikan dampak yang sangat mengecewakan yakni menewaskan beribu korban dari kedua belah pihak menambah semarak gaung permusuhan. Bau bom dan mesiu menjadi aroma dan parfum kehidupan disana. Para penduduk Irak kini lebih mementingkan membeli senjata dibanding membeli bahan makanan. Seorang pensiunan perwira Irak, Mohammed Jasim El-Azraki menyatakan bahwa membeli senjata saat ini adalah kebutuhan prioritas rakyat Irak. Dalam suasana kacau ini setiap orang perlu menjaga diri karena tidak ada yang tahu siapa kawan siapa lawan.

Tanggal 1 Mei 2005 di Talafar, kota dekat perbatasan Syi'ah, seorang pelaku pemboman menabrakkan mobilnya ke sebuah kemah yang dipenuhi pelayat, dalam acara pemakaman seorang pemimpin Kurdi. Sekitar 25 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka. Tiga hari kemudian, aksi yang sama menyerang sejumlah orang Kurdi yang sedang mengantarkan jenazah seorang pejabat Kurdi yang tewas di tembak di kota Mosul (Kapanlagi.com, 2005).

Ketegangan hubungan antara kaum Kurdi dan Sunni memang sudah terjadi, khususnya di kawasan utara kota minyak, Kirkuk. Kurdi mengklaim Kirkuk sebagai miliknya.

Tetapi hal tersebut ditentang Arab Sunni yang ditempatkan di kawasan itu dalam jumlah besar oleh pemerintah Partai Baath di bawah pimpinan Presiden Saddam Hussein. Berbagai serangan dan kekerasan mutakhir diperkirakan semakin mempertajam ketegangan antara kedua komunitas itu. Hal yang mungkin akan semakin mendorong kaum Kurdi menuntut kemerdekaan dan membentuk negara Kurdistan. Dan kemungkinan akan terjadi benturan antara pasukan Arab Sunni dan suku Kurdi mengingat bahwa suku Kurdi merasa telah terzalimi oleh pemerintah Arab Sunni dibawah pimpinan Saddam Hussein, dan suku Kurdi juga berambisi untuk menguasai lading minyak yang ada di Kirkuk karena dengan cara begitu akan efektif untuk menguasai dan mengelola minyak Irak dan juga dapat meningkatkan keuangan (Detik.com, 2012). Persoalan Kirkuk ini pun semakin mencuat setelah pemilu Desember 2005 kemarin. Ribuan rakyat Kurdi menduduki kota minyak tersebut. Pada umumnya mereka dibiayai oleh dua partai besar Kurdi; Partai Demokratik Kurdistan (PDK) dan Uni Patriotik Kurdistan (UPK).

Dalam segi pergeseran nilai sosial dan peradaban pada negeri Irak, jelas akan mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan akan ada pemerintahan baru yang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk pembangunan kembali negeri Irak pasca invasi. Peradaban Irak di masa depan akan lebih terbuka dan demokratis dibanding pada saat masa Saddam Husein yang selalu lebih mengutamakan perang sebagai alat menegakkan kehormatan bangsa. Irak memerlukan sosok yang dapat menaikkan derajat bangsa Irak di mata internasional, bukan sebagai pelopor dalam bidang perang dan senjata nuklir, tetapi pelopor dari kemajuan peradaban dunia, seperti pendidikan, teknologi, seni, dan pemikiran.

Seperti yang kita ketahui bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Irak ini adalah serangan yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi selain minyak yang disambut baik oleh Syia'ah dan Kurdi di Irak atas kemenangan Amerika Serikat

menjatuhkan rezim Saddam Husein karena mereka yang mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti pembatasan dalam kegiatan politik dan juga ketidakadilan dalam sudut pandang kehidupan terutama ekonomi sejak rezim Saddam Husein berdiri. Kegembiraan itu terlihat dari reaksi warga Irak saat Saddam Husein tertangkap pada 13 Desember 2003 di Tikrit, warga Irak menganggap bahwa ini adalah awal dari demokratisasi di Irak. Walaupun sebenarnya banyak juga kalangan yang cenderung ragu dalam menyikapi peristiwa ini karena cara yang digunakan oleh Amerika Serikat sendiri tidak menunjukkan sikap demokratis, malah mereka berpendapat bahwa serangan yang di berikan Amerika Serikat sendiri itu telah melanggar tatanan politik modern, seperti piagam PBB, kedaulatan, otoritas, legitimasi politik, dan prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan salah satu perwujudan stabilitas politik (Winarno, Satu dekade pasca invasi AS di Irak, 2015).

Konflik yang terjadi di Irak ini sebenarnya susah untuk di redam, terlihat sepiintas konflik ini dapat dikategorikan sebagai konflik antar agama atau suku, namun disisi lain konflik ini juga dapat dikategorikan sebagai konflik politik. Karena konflik ini terjadi karena perebutan kekuasaan antara masyarakat maupun kelompok kepentingan di Irak.

James menuturkan jika konflik di wilayah Timur Tengah itu kemudian juga sering disalah artikan sebagai “Perang Saudara” yang merupakan perselisihan antara kelompok kepentingan yang bertujuan untuk memperebutkan kekuasaan pemerintah atau ingin melakukan perubahan kebijakan (Fearon, 2007, p. 3).

Dari pihak internasional pun sangat memprihatinkan atas konflik tersebut yang telah memberi dukungan atas pemecahan permasalahan yang terjadi salah satunya adalah Iran, yang mana beberapa tokoh melihat bahwa keterkaitan internasional dalam permasalahan di anggap sangat penting

untuk mendapatkan jalan keluar dari konflik ini, namun telah banyak yang telah terlibat atas konflik ini secara langsung maupun tidak langsung belum juga memperlihatkan hasil yang menyenangkan bahkan keterlibatan tersebut semakin membuat ketidakstabilan dalam politik dan keamanan di Irak yang menghasilkan pada konflik berlandaskan sektarian (Cordesman, 2006, p. ii)

Kemudian konflik Irak masih tetap berlanjut sejak penangkapan Saddam Husein pendukungnya terus melakukan aksinya yang dikompromi oleh kelompok Al-Qaeda, yang mana mereka telah membombardir tempat-tempat suci orang-orang Syi'ah di kota Karbala Baghdad sebagai peringatan untuk kelompok Syi'ah dan juga Iran agar tidak ikut campur pada pemerintahan Irak. Tidak itu saja ketika menjelang masa pemilu ketegangan itu masih berlangsung yakni pada tanggal 8 September 2004 semua kelompok dari kelompok Sunni, Syi'ah, maupun Kurdi telah mengekspresikan kepentingan politiknya di kota Fallujah, dimana mereka terlibat dalam serangan berdarah yang telah menewaskan 38 tentara, 6 tentara Irak, dan sekitar 1.200 masyarakat sipil yang meninggal dalam serangan tersebut, yang bertujuan untuk memperingatkan Iran agar tidak ikut campur dalam pemilihan yang akan di selenggarakan di Irak (Respati, 2015, p. 34).

Pemilihan umum pertama ini hasilnya akan membentuk sebuah pemerintahan transisi di Irak yang mana pemerintahan transisi ini akan diberikan amanah untuk membuat konstitusi baru bagi pemerintahan Irak. Mengawasi fungsi dan kinerja badan legislative hingga terselesaikannya konstitusi Irak yang baru, dan juga mengawasi kinerja dan fungsi pemerintah transisi yang telah terbentuk. Pada saat kampanye berlangsung, koalisi antara partai Syi'ah dinilai lumayan solid dalam menjaga keutuhan koalisinya, karena guna memenangkan dominasi politik dalam proses pemilihan umum di Irak. Terlihat kecenderungan kemenangan koalisi

partai Syi'ah sebelum masa pemilihan yang telah membuat geram lawan politiknya. Hal inilah yang membuat gerakan militer partai Ba'ath melakukan serangkaian serangan terhadap tempat pemilihan di kota Baghdad yang mana mereka telah melakukan serangan sebanyak 100 kali menggunakan senjata yang mengakibatkan 20 orang tewas dan juga mereka melakukan aksi bom bunuh diri yang menewaskan 44 orang termasuk diantaranya 9 orang pelaku bunuh diri dengan tujuan untuk mengacaukan proses berjalannya pemilihan (Respati, 2015, p. 35).

Tetapi setidaknya ketika rezim Irak terguling masyarakat Irak sudah terbebas dari hidup yang terdiskriminasi oleh rezim tersebut selama bertahun-tahun, kemudian pada tanggal 15 Desember 2005 pemilu secara demokratis dilaksanakan dimana kelompok Sunni diwakili oleh *United Iraqi Alliance* dan memperoleh kursi terbanyak di parlemen Irak yakni 128 kursi dari total 275 hampir setengah kursi dari keseluruhan di pegang oleh Sunni. Jelas terlihat bahwa dengan mengadakan pemilu suara rakyat Irak dapat tersalurkan secara bebas tanpa ada tekanan apapun. (Respati, 2015, pp. 36-37)

Walaupun invasi yang dilakukan oleh Presiden Bush itu untuk mendorong Irak menjadi negara yang di dasari oleh sistem demokrasi namun cara-cara yang dilakukan Presiden Bush itu tidak mencerminkan demokrasi, Agresi militer ini ditujukan sesuai dengan namanya yakni Operation of Iraqi Freedom yang bertujuan untuk membebaskan rakyat Irak dari erezim Saddam Husein yang otoriter , namun pada kenyataannya cara yang ditunjukkan oleh Presiden Bush ini tidak lazim karena biasanya invasi yang ingin meruntuhkan sebuah rezim biasanya dilakukan oleh para pemimpin yang otoriter dan fasis. Pada umumnya kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan militer biasanya bertujuan untuk dapat membungkam suara-suara kritis dalam masyarakat, militer ini digunakan untuk semata-mata menjamin dan memperpanjang

kekuasaan suatu rezim. Maka dari itu agresi militer yang dilakukan ini hanya bermaksud untuk menumbangkan suatu rezim dan kemudian membangun system yang baru dan biasanya system demokrasi lah cocok untuk di terapkan karena seringkali demokrasi ini hanya sebagai alat untuk memperpanjang kepentingan tertentu (Winarno, 2014, p. 111).

Dengan kata lain usaha yang diberikan Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya dalam melakukan invasi terhadap Irak untuk menguatkan pengaruh politiknya di Irak agar mudah dalam mencapai kepentingan nasionalnya dengan mendorong terjadinya perubahan politik yakni menuju proses demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan dukungan internasional yang menganggap bahwa Irak adalah negara yang mempunyai senjata pemusnah masal dan juga menciptakan teroris yang akan memberika ancaman bagi dunia, namun setelah di lihat lebih jelas lagi kebijakan ini lebih dalam, ternyata tujuan Amerika Srikat ini untuk bagaimana kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut tidak terancam, menurut Henry B. Mayo demokrasi menjamin terjadinya perubaqhan secara damai dalam suatu masyarakat dan menyelenggarakan pengganti pemimpin secara teratur kemudian membatasi pemakaian kekerasan. Dan pada kenyataanya kebijakan ini diambil karena kepentingan Amerika Serikat akan terancam di kawasan tersebut.

Sebagai contoh seperti sikap Amerika Serikat di Aljazair menjadi sebuah contoh untuk mendukung argumentasi Hans diatas, Sikap yang ditunjukkan Amerika Serikat pada saat peistiwa kudeta militer di Aljazair pada tahun 1992, dalam kasus tersebut Amerika Serikat diam dan tidak berbuat apapun untuk mengembalikan pemerintahan demokrasi karena kemenangan yang dimenangkan oleh kelompok islam garis keras Aljazair yang harus dibatalkan, sikap itu diambil karena kepentingan Amerika Serikat di

Aljazair terancam jika Aljazair harus menjadi negara Islam. Contoh lainnya seperti pada saat terjadi kongres Amerika Serikat yang harus menghentikan bantuan militer ke Indonesia pada saat setelah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timur Timor dan juga Irian Jaya. Dan menurut catatan Thantowi bahwa berbagai kejadian yang telah terjadi menyangkut usaha-usaha Amerika Serikat untuk menjatuhkan rezim ditaktor secara paksa seperti Panama, Haiti, Grenada, dan juga Afganistan yang setelah invasi kehidupan sosial dan juga politik mereka tidak mengalami peningkatan yang berarti, dalam artian sedikit sekali mengalami kemajuan pada saat demokrasi diterapkan salah satu contohnya Afganistan kehidupan sosial dan sistem politik demokrasi di negara itu sejak Hamid Kharzai berkuasa juga tidak mengalami kemajuan yang berarti jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Taliban (Winarno, Satu Dekade Pasca Invasi AS di Irak, 2014, pp. 109-110).

Contoh diatas adalah sebuah fakta yang sengaja untuk ditampilkan agar kita dapat melihat bahwa jangan terlalu berharap pada peran Amerika Serikat untuk mendorong proses demokratisasi di Irak ataupun kawasan Timur Tengah, karena walaupun Amerika Serikat membantu dalam proses demokratisasi di wilayah Irak ini, maka tidak akan terlepas dari kepentingan geopolitiknya. Lalu sebaliknya pada saat proses demokratisasi hendaklah lebih melihat konteks internal masing-masing negara, terutama yang menyangkut pada suprastruktur dan infrastruktur demokrasi yang mendukung, dalam artian walaupun negara lain ingin mendukung terjadinya perubahan sistem demokratisasi di Irak, namun peran atau bantuan tersebut tidak akan berarti jika kondisi internalnya tidak mendukung proses perubahan tersebut, Salah satu faktor yang mempunyai peran besar dalam mendorong demokratisasi tersebut adalah budaya politik dan pembangunan ekonominya (Winarno, 2014, p. 113).

Setelah peperangan antara ISIS selesai masalah yang di hadapai kedepan adalah Korupsi dimana secara keseluruhan rakyat Irak percaya bahwa tantangan paling penting adalah negara ini dan pemerintahan Perdana Menteri Haider al-Abadi adalah korupsi, ia telah menguasai negara dan institusi sejak rezim Saddam Husein digulingkan (www.aawsat.com, 2018) .

Dan pada akhirnya Irak sekarang berdiri sendiri dengan ketidak stabilan politik dalam negerinya, beberapa tentara Amerika Serikat memang masih menduduki negara tersebut pangkalan militernya pun masih berdiri karena membantu Irak untuk membasmi terorisme yakni ISIS pada saat 3 tahun pertempuran terjadi antara pemerintah Irak dan juga ISIS yang menjanjikan terhadap rakyat Irak kemenangan yang hakiki dimana ISIS berjanji akan membentuk pemerintahan yang bersih tidak korupsi dan bersih tidak seperti sekarang yang mana korupsi merajalela dan kekacauan social politik lainnya, namun setelah kemenangan di menangkan oleh Irak, dikatakan oleh Perdana Menteri Irak Adel Abdel Mahdi bahwa ”jika kita tidak menghilangkan korupsi, kemenangan kita akan berkurang”, ini mengartikan bahwa Irak kini menghadapi tantangan yang lain termasuk 1,8 juta orang masih terlantar, dan 8 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, pengangguran yang semakin meluas, dan juga korupsi yang terus merajalela, sementara itu juga Irak merupakan negara terkorup nomor 12 di dunia versi Transparency Internatinal. Kemudian negara Irak masih juga krisis politik dimana ditandai dengan pemilihan parlemen pada Mei 2018, tidak menghasilkan koalisi yang jelas, dengan perpecahan politik untuk melumpuhkan upaya Perdana Menteri Mahdi mengisi posisi-posisi kunci cabinet (Yasinta, 2018).

4.2 Kesimpulan

Setelah kebijakan invasi Amerika Serikat sukses dengan menjatuhkan rezim Saddam Husein, keadaan Irak

sangat memprihatinkan, namun Amerika Serikat langsung membangun Irak dari porak poranda pasca invasi mulai dari membangun infrastruktur, memberikan bantuan kepada warga Irak, hingga membantu Irak untuk pemilihan umum untuk pertama kalinya. Berbagai macam perubahan terjadi seperti masyarakat Irak berperang antara sesama yang dimana Irak mempunyai beberapa kelompok besar dalam negaranya yakni Sunni, Shi'ah, dan Kurdi, mengapa disebut perubahan social dikarenakan pada rezim Saddam perang ini tidak pernah terjadi karena takut akan Presiden yang ditaktor ini, sebenarnya Saddam dapat dikatakan menjadi salah satu Presiden terbaik bagi Irak yang dapat mencegah peperangan antara kelompok-kelompok besar yang ada di Irak. Dari segi ekonomi minyak menjadi masalah utama, oleh karena itu Amerika Serikat pasca invasi mereka akan mengandalkan cadangan minyak yang ada di Irak dengan cara memasukkan perusahaan-perusahaan swasta dari negaranya masuk ke Irak dan dapat mengelola cadangan minyak tersebut. Kemudian yang terakhir di bidang politik serangan-serangan Amerika Serikat yang bertujuan untuk menegaknya demokrasi dengan cara menggulingkan rezim Saddam Husein yang dianggap rezim otoriter, tidak mudah mendirikan demokratisasi di Irak banyak perlawanan yang diberikan oleh kelompok-kelompok yang kontra terhadap Amerika Serikat tersebut yang mencoba untuk mengacaukan pemilu pertama pada tahun 2005 dan karena adanya ikut campur Iran dalam pemilu yang mengakibatkan ribuan orang tewas untuk menuju pemilu pertama. Kemudian walaupun demokrasi telah di jalani tetapi prospek untuk damai di Irak masih belum jelas masih menyisahkan tanda tanya besar, karena menyangkut konflik Irak sendiri, tidak adanya jaminan bahwa kelompok-kelompok yang sekarang berada disana tidak melakukan perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan baru di Irak dengan melakukan kekerasan yang menggunakan senjata, contohnya pada saat pemilihan parlemen pada Mei 2018 yang tidak menghasilkan koalisi yang jelas dengan

perpecahan politik yang terjadi, jika perang internal itu terus terjadi maka akan sangat mengganggu stabilitas politik di Irak dan berdampak juga pada stabilitas politik di Timur-Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Almudarris, A. (2004). *Huru Hara Irak*. Yogyakarta: Cahaya Hikma.
- Cordesman, A. H. (2006). *Iraq's Evolving Insurgency and The Risk of Civil War*. Washington D.C: Center for Strategic and International Studies.
- Detik.com. (2012). *Kekerasan di Irak tewaskan 57 orang* . Indonesia: Detik.com.
- Dipoyudo, K. (1982). *Timur Tengah Dalam Pergolakan*. Jakarta: CSIS.
- Erawan, I. (2007). *Perang Irak*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Fearon, J. D. (2007). *Iraq's Civil War*. USA: Council on Foreign Relation.
- Kapanlagi.com. (2005). *25 Orang Tewas Saat Bom Hajar Iringan Jenazah di Kurdi*. Talafar: Kapanlagi.com.
- Kuncahyo, T. (2005). *Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish*. Jakarta: Buku Kompas.
- Nathaniel, F. (2017). *Ekonomi Irak Saat dan Sesudah Saddam*. Baghdad: Tirto.id.
- Respati, A. D. (2015, November 24). *Sikap Iran Terhadap Konflik di Irak Paca Saddam Husein*. Retrieved Maret 1, 2019, from Repository UNHAS:
file:///C:/Users/admin/Downloads/Documents/Skripsi%20-Sikap%20Iran%20Terhadap%20Konflik%20di%20Ir

ak%20Pasca%20Saddam%20Hussein%20-
%20Aditya%20Dwi%20Respati.pdf

Sukarwo, W. (2009). *tentara bayaran AS di Irak*. Jakarta: GagasMedia.

Winarno, B. (2014). Satu Dekade Pasca Invasi AS di Irak. *Journal UMY*, 111-112.

Winarno, B. (2015). Satu dekade pasca invasi AS di Irak. *Jurnal UMY*, III(2), 108.

www.aawsat.com. (2018). *5 Masalah Besar Menanti Irak di 2018*. matamatapolitik.com.

Yasinta, V. (2018). *Setahun usai Menang Lawan ISIS, Bagaimana Kondisi Terkini Irak?* Baghdad: Kompas.com.